

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki 17.508 pulau yang terdiri dari pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil dengan garis pantai yang membentang sepanjang 81.000 km. Merujuk pada data Badan Informasi Geospasial (BIG), luas wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km persegi dengan 2/3 wilayahnya berupa laut dan perairan (Martidjo, 2022). Hal itu didukung dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa luas wilayah perairan Indonesia mencapai 6,32 juta km persegi, sedangkan wilayah daratan Indonesia hanya sebesar 1,91 juta km persegi (BPS, 2021). Berdasarkan data tersebut, maka Indonesia ditetapkan sebagai negara terluas di Asia Tenggara yang memiliki garis pantai terpanjang. Menyusul fakta tersebut, Indonesia masuk ke dalam jajaran negara terluas di dunia dengan menempati peringkat ke-15 versi Worldometer (Worldometer, 2023).

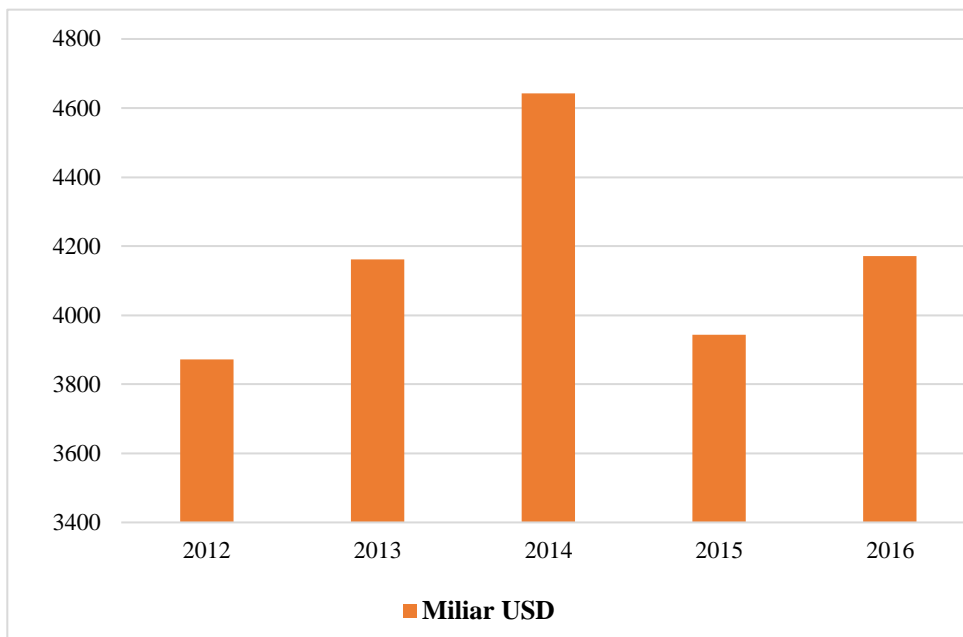
Gambar 1.1 Peta Indonesia



Sumber: Webiste Detik.com CITATION Ang22 \l 1033
(Martidjo, 2022)

Lanskap Indonesia yang didominasi oleh wilayah perairan, selaras dengan melimpahnya potensi kekayaan sumber daya laut Indonesia. Potensi lestari sumber daya laut Indonesia diperkirakan sekitar 12 juta ton per tahunnya. Potensi tersebut tersebar hampir di seluruh wilayah perairan Indonesia dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Di dalam laut Indonesia seluas sekitar 5,8 juta km persegi, 54% kebutuhan protein nasional dipenuhi dari ikan dan produk laut lainnya. Produk laut Indonesia telah membanjiri 10% produk perikanan dunia (Bachri, 2022). Sektor ekspor hasil komoditas laut menjadi indikator penting dalam pengembangan pemanfaatan sumber daya laut Indonesia.

Grafik 1.1 Ekspor Hasil Laut Indonesia Tahun 2012-2016



Sumber: Report Statistik Ekspor Hasil Laut Indonesia oleh KKP CITATION KKP16 \l 1033 (KKP, Statistik Ekspor Hasil Laut Indonesia, 2016)

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI), peningkatan ekspor komoditas hasil laut Indonesia dapat dilihat secara jelas dari tahun 2012 sampai 2016. Di tahun 2012 ekspor produk laut Indonesia berada di angka USD 3871,33 miliar. Nilai ekspor tersebut naik di tahun 2013 sebesar USD 4161,35 miliar. Nilai ekspor komoditas laut Indonesia secara umum memperlihatkan pertumbuhan yang tidak konsisten dari tahun ke tahun. Hingga di tahun 2016, nilai ekspor produk laut Indonesia menembus angka USD 6242,09 miliar. Momentum tersebut menjadi sebuah akselerasi kegiatan ekspor komoditas laut Indonesia yang mengalami naik-turun sebesar 10,66% dari tahun 2014 dengan nilai ekspor sebesar USD 4641,53 miliar (KKP, Statistik Ekspor Hasil Laut Indonesia, 2016).

Pulau Kalimantan memiliki dua provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Salah satu wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah Kabupaten Nunukan lebih tepatnya di Pulau Sebatik. Interaksi sosial dan ekonomi antar negara mendorong perekonomian pulau Sebatik melalui perkembangbiakan bahan pangan pokok, sandang, dan teknologi, sebaliknya warga Sebatik menjual hasil pertanian dan perikanan, Namun interaksi ini justru membuat beberapa masalah karena interaksi ini membuat masyarakat Sebatik secara ekonomi bergantung pada Tawau.

Pada tahun 1824 telah terbentuk perjanjian penetapan perbatasan Indonesia – Malaysia antara Belanda dan Inggris, yang ditandatangani di London pada tanggal 17 maret 1824, kemudian perjanjian tersebut menghasilkan keputusan yang berisikan kepulauan melayu merupakan lingkup pengaruh di antara Britania Raya dan Belanda yang juga dikenal sebagai negara kolonial terkuat pada masa itu. Setelah itu, berdasarkan dokumen resmi pertama Konvensi London menetapkan diaturnya mengenai perbatasan darat ini bergeser dan di adopsi oleh negara Indonesia setelah dilakukan perjanjian yang sudah di tanda tangani pada 20 Juni 1891, 1915 dan 1928, menjadi perbatasan antara Indonesia – Malaysia di Kalimantan yang telah disepakati oleh Britania Raya dan Belanda sebagai penerus dari kolonial 2 negara tersebut (Aryono P, 2015).

Pulau Sebatik walaupun terbilang pulau yang terpencil namun dianggap sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara Malaysia sehingga menjadi salah satu daerah perbatasan prioritas untuk dikembangkan namun Pulau Sebatik memiliki beberapa masalah yang cukup serius, kemungkinan cukup berpengaruh menjadi penghambat perkembangan daerahnya seperti kondisi aksesibilitas yang kurang dan cukup mengganggu pergerakan, kurangnya sarana prasarana dasar dan ekonomi serta banyaknya masyarakat yang berorientasi di negara tetangga. Jalur Transportasi utama yang menjadi penghubung antara Kalimantan Utara ke negara Malaysia yaitu pelabuhan Kabupaten Nunukan. Semua kegiatan ekspor dari provinsi Kalimantan Utara berlangsung dari sana (Djoko Marihandono, 2011).

Jika tidak segera dicarikan solusi, lambat laun dapat mengikis nasionalisme dan rasa bangga terhadap Indonesia bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Desakan kebutuhan ekonomi mendorong para pekerja dari Indonesia untuk berbondong-bondong pindah ke Malaysia, karena secara ekonomi Malaysia lebih menggiurkan dibandingkan Indonesia (Wahyuni dan Kusumaningrum, 2016).

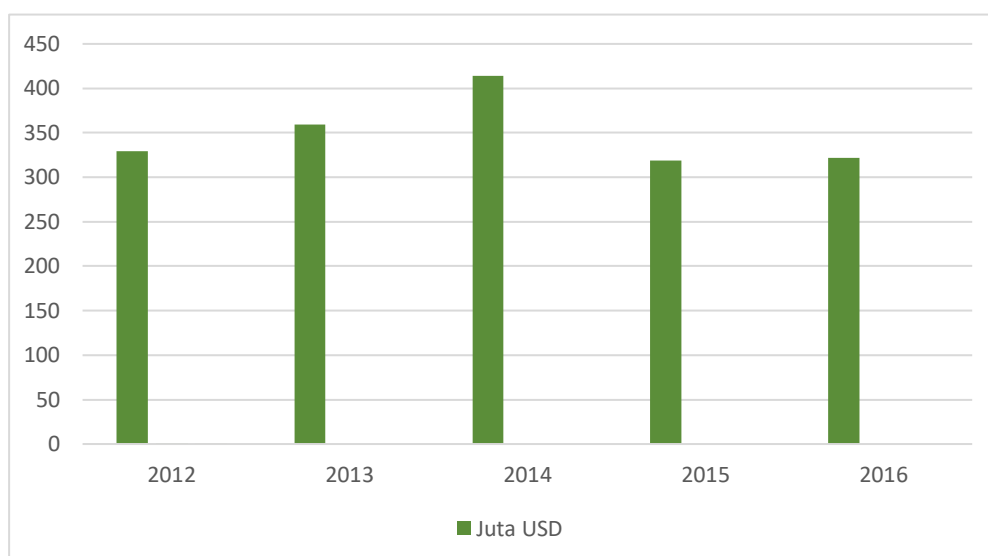
Perikanan merupakan salah satu komoditas perairan di Kalimantan Utara. Menurut Bappenas (2014). Hingga saat ini industri perikanan dipandang sebagai sektor yang telah teruji dan mampu bertahan pada masa krisis dan menyiapkan bahan pangan yang biasa ditambah dengan lahan tambak yang terus menerus berkembang maka membuat tenaga kerja dalam jumlah yang meningkat, melalui kegiatan penangkapan ikan dan budidaya bersamaan dengan perkembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan produk, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ini dapat diartikan sebagai upaya pemanfaatan sumber daya hayati perikanan dan sumber daya alam. Potensi perikanan yang ada di

Kalimantan Utara ini memiliki keberhasilan capaian pembangunan perikanan karena memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dengan indikator produksi nilai tukar nelayan, infrastruktur dan ekspor impor (Shafitri, Zulham and Muawanah, 2020).

Komoditas kepiting yang banyak diselundupkan ke luar negeri, salah satunya kepiting bakau. Kepiting bakau yang memiliki nama latin *mud crab (Scyllaserrata)* merupakan jenis kepiting yang banyak ditemukan dan dikembangkan di wilayah Kalimantan Utara (Cukai, Bea Cukai Kenalkan Kepiting Bakau, Primadona Baru Ekspor Merauke, 2021). Harganya yang tinggi, tidak menghalangi para konsumen untuk menikmati cita rasa kepiting bakau yang enak. Sehingga tidak heran jika kepiting bakau menjadi salah satu primadona di pangsa pasar global.

Merujuk data KKP, lebih dari 50% kepiting bakau asal Kalimantan Utara disiapkan untuk memenuhi pasar ekspor. Tingginya permintaan dari pasar luar negeri terhadap kepiting bakau, seharusnya dapat menjadi peluang untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Namun hal ini, juga menjadi celah yang dimanfaatkan para oknum untuk melakukan penyelundupan kepiting bakau. Terlebih, ASEAN sebagai salah satu wilayah tujuan utama ekspor kepiting bakau asal Kalimantan Utara. Sehingga menyebabkan potensi penyelundupan kepiting bakau semakin tinggi, karena Indonesia berbatasan langsung dan memiliki hubungan ekonomi maupun sosial yang kuat antar masyarakat di perbatasan (Ramlan, 2023).

Grafik 1.2 Ekspor Kepiting Indonesia Tahun 2012-2016



Sumber: Report Statistik Ekspor Kepiting oleh KKP
CITATION KKP221 \t \l 1033 (KKP, 2016)

Kepiting bakau merupakan jenis komoditas yang memiliki persentase ekspor terbesar,

karena dapat dilihat pada tahun 2012 maupun 2014 hampir semua kepiting dengan kualitas first grade diekspor, sedangkan sisanya berupa kepiting dengan kualitas second grade dikonsumsi di dalam negeri. Dengan sumber daya laut yang sangat besar ini, didukung kondisi geografis Indonesia yang sangat strategis memberikan tantangan besar dan kompleks dalam pengelolaannya (KKP, 2021). Di satu sisi, didukung dengan letak geografis Indonesia yang strategis dari perspektif ekonomi, seharusnya potensi laut Indonesia dapat lebih berkembang melalui kegiatan ekspor yang lebih mudah dilakukan. Namun kondisi yang demikian telah memberikan celah tersendiri bagi tindakan kejahatan transnasional terkait komoditas laut Indonesia yang dapat dilakukan antar batas negara.

Melimpahnya sumber daya laut Indonesia, tentu saja menarik perhatian pihak asing untuk dapat menikmatinya baik secara legal maupun illegal. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik 1.2 yang memperlihatkan pertumbuhan naik hingga turunnya nilai ekspor pada kegiatan ekspor hasil laut pada kepiting di Indonesia. Pada grafik 1.2 juga menggambarkan bahwa pada tahun 2012 sampai tahun 2016, nilai ekspor Indonesia yang tidak stabil dan hingga ditahun 2016 mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan oleh adanya kondusifitas kebijakan dari Pemerintah Indonesia maupun iklim perdagangan hasil laut (Adam, 2018).

Indonesia memiliki perairan yang menjadi salah satu jantung perdagangan internasional. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung dengan 10 Negara tetangga di Asia Tenggara. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan dengan Timor Leste, sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia dan negara lainnya. Letak dan jumlah pulau di Indonesia yang begitu banyak menjadi kekuatan dan kesempatan. Kekuatan dan kesempatan itu bisa diperoleh jika pulau-pulau yang sebagian besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya diolah dengan baik.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang memiliki luas daerah perairan yang cukup besar. Hal tersebut tentu dapat dijadikan suatu kesempatan untuk lebih memanfaatkan potensi maritim yang dapat dijadikan sebagai penopang ekonomi masing-masing negara. Namun, Indonesia memiliki kelemahan dalam mengawasi kekayaan laut karena masih banyaknya pihak dari luar negeri maupun lokal yang secara ilegal mengambil kekayaan alam Indonesia melalui perbatasan, yang secara geografis memang sulit untuk dilakukan pengawasan, Maka penyelundupan komoditas laut Indonesia menjadi salah satu konsekuensi

yang terjadi pada negara Indonesia karena memiliki hasil laut dengan pangsa pasar besar di luar negeri dan bernilai ekonomis tinggi.

Bisnis penyelundupan ini tentu saja dapat menghasilkan transaksi yang sangat besar dan dapat dilakukan dengan cara yang cukup sederhana. Tidak khayal jika kegiatan penyelundupan komoditas laut Indonesia sangat menggiurkan dan banyak terjadi di daerah perbatasan Indonesia. Praktik ekspor komoditas laut Indonesia secara illegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur membuat puluhan juta ton sumber daya laut Indonesia hilang, sehingga tidak hanya merugikan negara, namun juga mengancam nelayan, pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Praktik illegal tersebut sebenarnya telah menjadi ancaman keamanan dan keselamatan laut Indonesia sudah sejak lama. Perbatasan negara yang seharusnya menjadi gerbang kedaulatan negara malahan menjadi sebuah wilayah strategis dalam melakukan penyelundupan komoditas laut Indonesia (DeeWaluyo, 2019)

Posisi Sebatik pada perencanaan nasional, merupakan kawasan dengan potensi yang besar baik dari sumber daya alam (perikanan) maupun posisi strategis sebagai pemasok makanan ke Tawau Malaysia. Akan tetapi, Sebatik belum terlihat secara mandiri sebagai sebuah entitas yang disebutkan dalam agenda nasional, Jika melihat dari sisi permasalahan perekonomian wilayah perbatasan, sangat dipengaruhi oleh negara tetangga. Hal ini dikarenakan wilayah negara tetangga kondisinya jauh lebih maju jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian di wilayah perbatasan Indonesia. Selain dikarenakan kondisi negara tetangga lebih baik, aksesibilitas relatif lebih mudah ke negara tetangga dibandingkan ke pulau utama (main land) yang terdekat di Indonesia juga persoalan di hampir seluruh wilayah perbatasan selama ini tidak jauh dari persoalan ekonomi yang belum terselesaikan.

Jika dipandang dari sudut Geografis Kota Tarakan adalah pulau di kalimatan Utara yang bersingungan langsung dengan perairan Internasional serta Kota Tarakan adalah Pulau di Kalimantan Utara yang perairan lautnya berbatasan langsung dengan Perairan laut Malaysia (Tawau) maka Potensi perdangan baik ekspor dan Impor menjadi hal menarik bagi para pelaku usaha karena akan mengurangi biaya / cost dalam pelaksanaannya tetapi jika dipandang dari sisi Hukum akan timbul kerawanan yaitu mudahnya terjadi penyelundupan (smuggling).

Dalam industri perikanan, Indonesia merupakan wilayah yang kaya akan berbagai jenis ikannya. Bagaimana tidak, karena kita tidak tahu bahwa begitu banyak penangkapan illegal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki izin perdagangan. Sehingga bangsa

Indonesia akan menjadi miskin bila dibiarkan seperti itu terus, seharusnya kita bisa memanfaatkan industri perikanan ini dengan pengolahan ikan, pengalengan ikan dan ekspor yang sesuai standar kualitas nasional dan internasional demi mendukung kelancaran industri perikanan Indonesia. Adanya aktivitas kegiatan ekspor yang dilakukan secara ilegal di perairan laut Indonesia, khususnya di perairan laut sebatik yang berbatasan dengan perairan Malaysia tentunya memberikan dampak yang cukup besar bagi Negara. Kerugian yang dinilai tidak hanya dapat dihitung oleh nominal saja, tetapi juga kerugian moral atau harga diri bangsa karena hal tersebut menyangkut kedaulatan pemerintah Indonesia. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang memiliki luas daerah perairan yang cukup besar. Hal tersebut tentu dapat dijadikan suatu kesempatan untuk lebih memanfaatkan potensi maritim yang dapat dijadikan sebagai penopang

Adanya konflik sumber daya yang dimana peningkatan aktivitas ekspor dapat memicu konflik antara nelayan lokal dan nelayan asing atau antara negara-negara yang bersaing untuk sumber daya perikanan tertentu, Lalu sengketa perbatasan maritim, Adanya sengketa perbatasan maritim antara kedua negara yang ketegangan dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah yang bersangkutan. Kesepakatan dan kerjasama diperlukan untuk mengatasi klaim yang saling bersaing juga ketergantungan pada pasar ekspor yang terlalu bergantung pada ekspor, negara-negara tersebut mungkin lebih rentan terhadap fluktuasi pasar global, perubahan kebijakan perdagangan internasional, atau krisis ekonomi yang dapat mempengaruhi sektor kelautan antara negara Indonesia dan Malaysia dan yang terakhir, tidak setara dalam manfaat ekonomi. Beberapa masalah diatas sangat komplikatif sehingga Indonesia dan Malaysia melakukan kerjasama internasional dalam bentuk kegiatan ekspor di bidang perikanan melalui perbatasan.

Penting untuk memastikan bahwa setiap kerjasama internasional dalam bidang perikanan memperhitungkan keberlanjutan, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Kebijakan dan praktik yang mendukung ekspor perikanan harus sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem laut, sehingga pemerintah kedua negara harus melakukan strategi- strategi yang konsen dalam bidang perikanan ini guna untuk saling memenuhi kepentingan antar kedua negara dan meningkatkan daya saing ekspor (Lerian, 2017).

Dengan kemampuan menggali dan memanfaatkan potensi kekayaan alam yang ada, Indonesia akan banyak memiliki pilihan produk yang dapat dikembangkan sebagai

komoditi perdagangan, baik untuk pasar local maupun untuk pasar internasional, , Di samping itu, pentingnya meningkatkan kapasitas sumber daya alam, melalui kerja sama pengembangan SDA antara Indonesia dengan Malaysia. Kerja sama peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya alam ini akan menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan dan meraih peluang investasi di bidang kelautan dan perikanan (Kementerian Energi dan Sumber Daya laut, 2024).

Tingginya potensi kepiting bakau di Indonesia, seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian negara. Maka, Indonesia-Malaysia melakukan kerjasama di bidang kelautan dan perikanan dan menjadikan Malaysia sebagai tujuan ekspor, Namun hal tersebut menemukan tantangannya di tengah masih adanya kegiatan penyelundupan kepiting ke Malaysia (Muhammad Arfan, 2023).Maka dari itu, peneliti mengarahkan penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam terkait strategi Pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan potensi sumber daya laut Indonesia melalui kegiatan ekspor kepiting bakau di Kalimantan Utara melalui perbatasan Indonesia dengan Malaysia di tengah maraknya kegiatan penyelundupan komoditas laut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan yang diajukan penulis pada penelitian ini yaitu: **“Bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan ekspor kepiting bakau dari Kalimantan Utara melalui perbatasan Indonesia dan Malaysia tahun 2016-2022?”**.

C. Kerangka Teori

1. Teori Kerjasama Internasional

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau yang tersebar dari sabang sampai merauke, Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keberagaman maupun hasil kekayaan alam dll. Atas potensi tersebut banyak negara yang tertarik untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia salah satunya adalah negara Malaysia..

Menurut teori kerjasama internasional yang dikemukakan oleh KJ. Holsti, bentuk interaksi dalam hubungan internasional dapat berupa konflik maupun kerjasama. Apabila pihak-pihak yang terlibat gagal dalam mencapai kesepakatan, maka interaksi antar aktor tersebut akan berujung pada konflik. Namun, apabila pihak-pihak yang terlibat berhasil dalam mencapai kesepakatan maka interaksi antara aktor yang terlibat akan menghasilkan suatu bentuk kerjasama. KJ. Holsti mengungkapkan bahwa hubungan kerjasama ini dapat terjalin apabila mendapat dukungan baik dari berbagai sisi baik dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya dan

lingkungan di dalam sebuah negara maka, bukan masalah yang besar bagi suatu negara untuk mengembangkan perekonomian negara tersebut ke arah yang lebih baik. dengan adanya hubungan kerjasama yang terjalin antara dua negara ini maka kedua negara akan saling bergantung satu sama lain baik dari segi ekonomi , politik, sosial, budaya, transportasi, telekomunikasi, dll dan dapat menghasilkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara Indonesia dan Malaysia yaitu Kerjasama bilateral, kerjasama bilateral yang dimaksud adalah bentuk kerjasama antara Indonesia-Malaysia di bidang ekonomi khususnya pada potensi perikanan yaitu kepiting bakau. Keduanya sangat unggul di dunia dalam ekspor kepiting bakau, meskipun Malaysia memiliki fasilitas yang lebih memadai dan terlebih di negara Malaysia bisa langsung melakukan kegiatan ekspor kepiting bakau ke negara luar lainnya tetapi tetap mereka memilih impor dari negara Indonesia. Malaysia tetap mengimpor dari Indonesia yang akan diolah kembali untuk dijadikan produk jadi yang ekonomis yang dapat dijual kembali. Terlepas dari beberapa faktor yang ada, di sisi lain Malaysia juga membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia untuk bekerja disektor perkebunan, perindustrian, dan lain-lain karena kurangnya sumber daya manusia di Malaysia. Keduanya saling membutuhkan dengan melakukan kerjasama bilateral di bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Kedua pemimpin negara percaya hubungan strategis ini signifikan dan memiliki pengaruh global.

Menurut teori diatas, ekspor kepiting yang dilakukan oleh Indonesia adalah sebagai upaya dalam meningkatkan hubungan kerjasama dengan Malaysia dibidang ekspor serta membuat peluang Indonesia untuk memasarkan produk dalam negerinya, hal ini akan memberikan dampak positif bagi pendapatan Indonesia dibidang perdagangan dan kelautan, namun persaingan tidak dapat dihindari pasar, yang menjadi tantangan bagi negara Indonesia. Setiap produk yang akan diekspor akan diawasi sebelum masuk kenegara tersebut dan setia negara memiliki standar tersendiri terhadap produk yang mereka ekspor. Ekspor kepiting Indonesia merupakan salah satu cara untuk mengeskpor kekayaan sumber daya alam Indonesia.

2. Teori Interdependensi

Bagi negara-negara berkembang sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk bangkit dari keterbelakangannya, dengan mempertegas kemampuan dan kapabilitas negara tersebut sehingga mampu mengubah diri dari tingkat ketergantungan dengan tingkat saling ketergantungan atau Interdependensi. Yang maksudnya adalah melakukan proses transformasi

ketergantungan menjadi kerjasama yang berimbang dalam bidang politik ekonomi yang mengakibatkan saling membutuhkan dan saling melengkapi (komplementasi) satu sama lain (Archer, 1992).

Prinsip teori Interdependensi ini adalah saling pengertian antar satu pihak dengan pihak lain untuk saling melengkapi dalam pemenuhan kebutuhan hidup masing masing secara adil dan berimbang. Karena pada dasarnya tidak ada satu negara pun di dunia ini yang mampu hidup sendiri tanpa adanya negara-negara lain yang menjadi relasinya. Menurut argumentasi Robert Keohane dan Joseph Nye, ide-ide kesalingtergantungan didasarkan atas 2 perspektif dalam memandang distribusi pengorbanan timbal-balik yang dihasilkan oleh hubungan kesalingtergantungan, yakni :

1. Bersifat ekonomi, bahwa kesalingtergantungan akan mempertemukan kekurangan dan kelebihan masing-masing pihak melalui keunggulan komparatif masyarakat

2. Bagaimana distribusi keuntungan dan kerugian tersebut Definisi yang moderat ialah dari Rosecrance dan Arthur Stein yang membaginya atas 3 konsep :

1. Kesalingtergantungan, menunjukkan hubungan kepentingan yang apabila posisi satu negara berubah, maka negara lain akan dipengaruhi oleh perubahan itu

2. Kesalingtergantungan, berasal dari aspek ekonomi yang menunjukkan bahwa hubungan itu terjadi ketika terdapat kepekaan nasional terhadap perkembangan ekonomi eksternal

3. Kesalingtergantungan, melibatkan suatu peringkat hubungan tertentu, yang jika terputus akan sangat merugikan di antara mereka. (Yanuar, 2006)

Dengan melihat dari landasan teori interdependensi seperti yang dijelaskan diatas, Hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia-Malaysia merupakan satu batu loncatan kepada proses transformasi dari ketergantungan menjadi kerjasama yang seimbang. Dalam hal ini hubungan ekonomi yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah di Indonesia kepada Malaysia berperan untuk saling melengkapi ketersediaan barang antara Indonesia-Malaysia maupun memudahkan distribusi perdagangan. Dengan secara tidak langsung hal ini juga memudahkan pelaku usaha ekspor kepiting bakau yang berada di Lintas batas Kalimantan Utara dalam memenuhi kebutuhan pokok serta mudahnya mendistribusikan barang baik ke luar maupun ke dalam negeri. (Perwita & Yani, 2005)

D. Hipotesis

berdasarkan penjelasan yang dicantumkan dalam penelitian dengan menggunakan teori kerjasama internasional dan perdagangan internasional, strategi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ekspor kepiting bakau, yaitu:

1. Penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan terhadap kegiatan ekspor kepiting bakau yang pelaksanaannya didukung oleh aktor negara maupun non-negara, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI, Direktorat Bea dan Cukai, dan para pelaku usaha kepiting bakau.
2. Mengoptimalkan strategi yang dilakukan pemerintah dalam kerjasama Indonesia dan Malaysia terhadap kegiatan ekspor kepiting bakau melalui perbatasan

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tugas akhir ini dibuat yaitu untuk menganalisis strategi pemerintah dalam meningkatkan daya saing ekspor kepiting bakau dari Kalimantan Utara melalui perbatasan Indonesia-Malaysia dan memberikan informasi mengenai kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia ekspor kepiting bakau dari Kalimantan Utara melalui perbatasan Indonesia-Malaysia 2016-2022.

F. Jangkauan Penelitian

Pada penelitian ini untuk membatasi pembahasan agar tetap terfokus pada tujuan utama penelitian, maka penulis menganalisis tentang strategi Pemerintah Indonesia dalam pengoptimalisasian kegiatan ekspor kepiting bakau dari Kalimantan Utara melalui perbatasan Indonesia-Malaysia yang dilakukan mulai tahun 2016 hingga tahun 2022. Pada tahun 2016, dimana Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan Permen KP mengenai Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*). Fokus pembahasan akan berakhir pada tahun 2022 yang dimana ini adalah tahun terakhir dikeluarkannya permen KP setelah 7 kali pembaharuan juga ditandai dengan dilakukannya berbagai program kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam kegiatan ekspor kepiting bakau di tahun 2022.

G. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menerapkan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian dengan metode survey, observasi juga yang melakukan beberapa wawancara berencana. Upaya ini membutuhkan sumber yang dapat dipercaya juga konkret dari instansi resmi pemerintah, beberapa sumber berita Internasional dan berita lokal yang akurat, serta pihak yang memiliki data yang valid juga mengizinkan untuk kita angkat sebagai data kedalam bahan penelitian ini, Maka dari itu, rumusan masalah dapat memberikan jawaban yang konkret dan eksplanasi lebih lanjut tentang topik yang dibahas, dibuat dengan penguraian analitis dan penjelasan yang mudah. Yang dimana menggunakan perincian secara lengkap pada topik yang di bahas, dan juga dianalisis dengan menggunakan teori dan konsep yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Informasi yang diperoleh agar dapat

mendukung penelitian ini merupakan informasi primer karena dilakukan dengan cara survey secara langsung dan juga data yang diambil langsung dari tangan pertama . Metode kualitatif menyampaikan fakta dengan menggambarkan, menggunakan design sederhana, juga dengan apa yang peneliti terima, rasakan, lihat lalu dituangkan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan artikel ilmiah ini akan dibagi menjadi beberapa bab, dengan bab-bab tersebut saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang utuh.

- BAB I** : Ini merupakan bab yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan yang mana terdapat pernyataan latar belakang berisi tentang dampak terhadap pengeksporasi pada potensi perikanan khususnya kepiting bakau di lintas batas Kalimantan Utara, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan juga sistematika penulisan.
- BAB II** : Memberikan gambaran bagaimana proses hubungan dan dampak dari kerjasama ekonomi perdagangan internasional di Indonesia pada potensi perikanan atau hasil dari laut Kalimantan Utara terkhusus nya Kepiting Bakau yang di ekspor ke negara Malaysia sebagai perantara akibat pengaruh demografi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Tawau, Malaysia juga Menguraikan data pengiriman beserta kerugian dan keuntungan pada saat Ekspor Kepiting Bakau yang di eskpor ke negara Tawau, Malaysia Tahun 2016-2022 melalui kerjasama perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia-Malaysia secara deskriptif.
- BAB III** : Membahas bagaimana strategi bersaing dan juga memperbaiki kualitas potensi perikanan di Kalimantan utara, bagaimana pemerintah dalam mempertahankan daya saing ekspor untuk menciptakan peningkatan kerjasama internasional, khususnya dengan. negara Malaysia.
- BAB IV** : Dalam bab ini merangkum kesimpulan berisi hasil yang dapat disimpulkan secara menyeluruh dari pembahasan bab-bab sebelumnya juga atas kerjasama dalam kegiatan ekspor kepiting

bakau melalui perbatasan Indonesia-Malaysia, Selanjutnya ditutup dengan saran yang mungkin dirasa dapat menjadi pesan dari penulis dalam penelitian ini.